

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BISNIS INDONESIA	10	19-6-'02

Fasilitas pengapalan KPC terancam diblokade

BALIKPAPAN (Bisnis): Manajemen PT Kaltim Prima Coal menegaskan tidak akan membiarkan ancaman blokade oleh segelintir kalangan terhadap fasilitas pengapalan batubara di Tanjung Bara.

Noke Kiroyan, *president director* PT Kaltim Prima Coal (KPC) mengatakan, pihaknya memperoleh informasi adanya rencana blokade dari pemberitaan media massa lokal yang dikaitkan proses divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal.

"Kami akan melaporkan perbuatan itu sebagai tindakan melawan hukum kepada yang berwajib, apalagi jika sampai mengganggu proses produksi," katanya.

Sekelompok orang diketahui akan melakukan blokade

terhadap fasilitas kapal pengangkut batubara PT Kaltim Prima Coal sebagai reaksi atas proses divestasi 51% saham Kaltim Prima Coal yang belum mencapai kesepakatan final.

Tindakan blokade, menurut Noke, sebaiknya tidak dilakukan karena akan sangat mengganggu kinerja perusahaan batubara itu dan dampaknya dirasakan banyak pihak.

"Jika hal itu [blokade] dilakukan, yang rugi tidak hanya perusahaan. Tapi jelas negara dan rakyat juga ikut menanggung kerugian."

Dia mengimbau semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan melawan hukum berkaitan proses divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal.

Ketika dikonfirmasi *Bisnis*, Bupati Kutai Timur Awang Faroek menuturkan bahwa saat ini keadaan di Tanjung Bara aman.

"Tidak ada gerakan apapun di sini. Saya berani jamin dan jabatan saya sebagai taruhannya," ujarnya.

Dia menambahkan masyarakat Kutai Timur akan ikut menjaga keamanan PT Kaltim Prima Coal. Jika KPC terganggu, lanjutnya, maka masyarakat juga merugi.

Mengenai masalah makin berlarut-larutnya proses divestasi KPC, Noke Kiroyan mengatakan bahwa bukan KPC yang memperumit masalah, "tapi justru pemerintah provinsi Kaltim yang sampai sekarang tidak mencabut gugatan dan sita jaminan di pengadilan." (p2/09)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SUARA PEMB.	5	18-6-'02

Bukit Asam Siapkan Dana Beli Saham KPC

PT TAMBANG Batubara Bukit Asam menyiapkan dana US\$ 422 juta untuk membeli 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Untuk membeli KPC ini, PT Tambang Batubara Bukit Asam menggandeng sindikasi sejumlah bank milik pemerintah.

Hal ini diungkapkan Corporate Secretary PT Tambang Batubara Bukit Asam Ir Munandar Saisohar di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, sebagaimana dikutip. Menurutnya, dana ini disiapkan untuk menjalankan tugas dari pemerintah agar membeli saham KPC karena dinilai memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan perusahaan tambang

batubara ke depan.

Namun diakuinya, untuk mendapatkan saham tersebut, tidak segampang membalikan telapak tangan karena KPC saat ini diminati beberapa perusahaan yang lainnya, seperti PT Aneka Tambang, PT PLN, PT Timah, PT Nusantara Energi, serta Pemprov Kalimantan Timur.

"Jika berhasil mendapatkan saham tersebut, banyak keuntungan yang akan didapatkan dalam mengelola KPC yang saat ini 100 persen sahamnya dimiliki oleh PT Riotinto itu," jelasnya.

(Ant)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	MEDIA IND	2	19-6-'02

PT BA akan Beli 25% Saham Kaltim Prima Coal

JAKARTA (Media): Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam (PT BA) Ismet Harmaini menegaskan bahwa pihaknya berminat untuk membeli 25% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai US\$210 juta. Bukan 12% dengan dana sebesar US\$218 juta sebagaimana diberitakan selama ini.

"Namun, sebelum itu, kami akan meminta persetujuan lebih dulu dari pemerintah sebagai pemegang sahamnya. Dalam hal pendanaan, PT BA tidak memunyai dana sebanyak itu. Bila diizinkan pemerintah, PT BA akan mencari cara terbaik untuk mendapatkan dana tersebut," kata Ismet dalam siaran persnya yang diterima *Media*, kemarin.

Selain itu, Ismet juga membantah bahwa pihaknya telah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pihak mana pun dalam proses divestasi 51% saham PT KPC.

"Apalagi *statement* yang menyatakan ada beberapa pihak yang sudah mengeluarkan dana hingga US\$5 juta untuk memenangkan proses divestasi tersebut," ungkap Ismet.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi D DPRD Sumatra Selatan (Sumsel) tentang pertimbangan yang mendasari minat PT BA itu, Ismet menjelaskan bahwa saham KPC ini sangat wajar diminati banyak pihak karena merupakan tambang paling efisien di Indonesia, dengan kualitas kandungan batu baranya yang sangat baik, yaitu di atas 6.900 kal/kg.

Kualitas semacam ini sangat

cocok dengan kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada umumnya di dunia, apalagi mayoritas penjualannya berlangsung dengan kontrak jangka panjang. Sementara batu bara yang ada di PT BA sebagian besar berkualitas 5.100kal/kg dan sisanya berkualitas 6.800kal/kg.

"Di samping itu, dari sudut bisnis, KPC sangat *profitable* sehingga wajar banyak perusahaan yang berminat untuk bisa ambil bagian dalam divestasi tersebut," kata Ismet tentang perusahaan yang kini sahamnya dikuasai Beyond Petroleum (dulu British Petroleum), Inggris, dan Rio Tinto dari Australia.

Menutup Ombilin

Mengenai rencana pehutupan tambang batu bara Ombilin, di Sawahlunto, dalam diskusi dengan Komisi D DPRD Sumsel itu, Dirut PT BA tidak pernah menyatakan akan menutup tambang tersebut.

Pada saat itu, Ismet hanya menyatakan bahwa pihaknya akan mengajak PT Semen Padang dan PT PLN (PLTU Sijantang) untuk ikut bersama-sama memikirkan kesinambungan tambang Ombilin, karena kedua perusahaan itu merupakan konsumen terbesar PT BA di Sumatra Barat dan jelas sangat berkepentingan dengan keberadaan Ombilin.

"Kalau Semen Padang dan PLTU Sijantang mendatangkan batu bara dari luar, jelas biayanya akan lebih mahal. Selain itu, kualitasnya belum tentu cocok dan sebaik Ombilin," tegas Ismet. (E-2)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	B. BUANA	6	18-6-'02

Kasiepo: Diizinkan, Penambangan di Hutan Lindung

Jakarta, Buana

Soal lemahnya koordinasi dalam Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarnoputri kembali terbukti. Setelah "perang" terbuka soal Dana Moneter Internasional (IMF) antara Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dengan Kwik Kian Gie, kini giliran Menteri Kehutanan M Prakosa yang harus berhadapan dengan Meneg Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kasiepo dalam masalah izin penambangan di hutan lindung.

Manuel Kasiepo mengatakan, ratusan perusahaan pertambangan yang telah menandatangani kontrak karya (KK) sebelum diberlakukannya UU No 41/1999 tentang Kehutanan tetap bisa meneruskan usahanya meski usahanya dilakukan di kawasan hutan lindung.

"Perusahaan (pertambangan) yang telah menandatangani kontrak karya itu sudah dikeluarkan biaya yang besar untuk eksploitasi. Apalagi perjanjian itu bersifat internasional," kata Manuel usai bertemu Wapres Hamzah Haz di Istana Wapres Jakarta, Senin (17/6).

Sejauh ini, katanya, lebih dari 100 perusahaan pertambangan — yang telah menandatangani KK — sudah diseleksi. Dari jumlah itu, terdapat 20 perusahaan, yang kemudian diseleksi kembali

berdasarkan prioritas hingga didapat 4 perusahaan, antara lain perusahaan Nikel di Papua, perusahaan Nikel di Halmahera dan perusahaan tambang Citra Palu Mineral di Palu.

Setelah empat perusahaan ini berjalan, izin operasional akan diberikan kepada perusahaan lain yang telah meneken KK dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM).

Manuel menyatakan, dari berbagai pertemuan dengan pejabat di Dephut dan DESDM serta kalangan DPR, sudah ada kesepakatan bahwa perusahaan pertambangan yang sudah meneken KK sebelum UU No 41/1999 harus tetap berjalan. "Usaha penambangan di kawasan hutan lindung itu, juga sudah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah masing-masing untuk dilanjutkan operasionalnya," katanya.

Tetap Larang

Apa yang dikemukakan Kasiepo ini jelas mengulangi



Manuel Kasiepo

■ DOK KOMPAS

pernyataan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral DESDM, Wimpy S Tjetjep, dan kemudian dibantah keras oleh Menhut Prakosa. Menurut Menhut beberapa waktu lalu, pihaknya tidak pernah punya kesepakatan dengan DESDM untuk mengizinkan empat perusahaan penambangan melanjutkan operasinya

di lahan hutan lindung. Menhut tetap tegar bahwa kegiatan penambangan terbuka di lahan hutan lindung tersebut bertentangan dengan UU No 41/1999

"Saya tidak pernah memberi pernyataan tentang kesepakatan mengizinkan empat perusahaan penambangan untuk melanjutkan operasi di lahan hutan lindung. Tetapi yang ada saat sidang kabinet terbatas 6 Maret 2002 lalu, dibahas tentang bagaimana solusi bagi 22 perusahaan penambangan yang sudah melakukan penandatanganan KK sebelum diberlakukannya UU No 41/1999," ujar Prakosa.

Menhut menegaskan, tindakan yang memperbolehkan perusahaan penambangan untuk

melanjutkan operasi di hutan lindung tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan UU No 41/1999. Undang-undang tersebut tegas melarang terhadap siapapun juga melaksanakan kegiatan penambangan di lahan hutan lindung. Alasannya guna menjaga kelestarian flora maupun fauna yang ada di kawasan hutan yang dilindungi tersebut.

Sebelumnya Wimpy S Tjetjep mengemukakan, pemerintah telah mengizinkan kepada empat perusahaan, di antaranya PT Gag Nikel, PT Weda Bay, PT Citra Palu Mineral dan PT Nusa Halmahera Minerals untuk melanjutkan penambangan di lahan hutan lindung. Pemberian izin itu dikeluarkan, karena sudah ada kesepakatan dengan Departemen Kehutanan.

"Selama ini, perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan penambangan, karena tebetur UU No 41/1999 tentang kehutanan, yaitu larangan penambangan terbuka di lahan hutan lindung. Keempat perusahaan tersebut boleh melanjutkan kegiatannya, karena saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian masalah administrasi saja, sehingga pengusaha tambang tersebut tidak perlu menunggu hitam di atas putih untuk melanjutkan kegiatannya," tutur Wimpy. □ Ant/lil

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KOMPAS	20	19-6-'02

Pekerja Kilang Minyak Balongan Mogok

INDRAMAYU, KOMPAS — Sekitar 1.000 pekerja kontrak di Pertamina Unit Pengolahan (UP) VI Balongan atau Kilang Minyak Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hari Selasa (18/6), berunjuk rasa menuntut kenaikan upah. Mereka mogok kerja dan melakukan *long march* dari tempat kerja mereka menuju Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Indramayu.

Unjuk rasa tersebut adalah yang kedua kali, setelah sehari sebelumnya mereka juga mogok kerja di lingkungan Kilang Balongan. Tuntutan para mitra pekerja yang dipekerjakan dengan sistem kontrak itu masih sama, yaitu kenaikan upah sebesar 50 persen dari upah bersih yang mereka terima sekarang.

Para pekerja itu mengatakan, terdapat perbedaan perlakuan terhadap para pekerja kontrak di Pertamina UP VI dibanding di unit-unit kerja Pertamina yang lain, seperti misalnya di Pertamina DOH

JBB (Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat). "Meskipun sama-sama pekerja kontrak, tetapi di DOH, gaji mereka lebih besar dari yang kami terima. Ini jelas tidak adil," ungkap seorang pengunjung rasa.

Menurut mereka, saat ini gaji pokok ditambah komponen tunjangan natura (uang makan) dan transpor pekerja kontrak di UP VI Balongan adalah sebesar Rp 476.400, sementara gaji pokok ditambah komponen tunjangan yang sama pekerja kontrak di Area Operasi Timur milik DOH JBB di Kecamatan Karangampel, Indramayu, mencapai Rp 682.800.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Iwan Hendrawan, seusai menemui para pengunjung rasa mengatakan, pihaknya sedang bernegosiasi dengan pihak Pertamina UP VI berkaitan dengan penyelesaian tuntutan ini.

Tak ganggu produksi

Berdasarkan data tertulis

dari Pertamina, upah bersih yang dibawa pulang (*take home pay*) para pekerja kontrak di UP VI Balongan yang bekerja sebagai sopir ringan *grade 1* (mobil-mobil nonbus) selama ini mencapai Rp 855.000 per bulan.

"Dan *take home pay* mereka akan naik menjadi Rp 1.000.260 mulai bulan Juli nanti setelah Pertamina memberlakukan kenaikan sebesar 16,8 persen," ujar Iwan mengutip keterangan dari Pertamina. Jumlah gaji bersih tersebut memang berada sedikit di bawah gaji bersih pekerja dengan fungsi yang sama di Pertamina DOH JBB, yaitu sebesar Rp 1.152.725 per bulan dan di atas gaji bersih pekerja Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) III sebesar Rp 612.676 per orang per bulan.

Sementara itu, Kepala Humas Pertamina UP VI Suwandi mengatakan, aksi mogok tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada kegiatan produksi dan distribusi BBM (bahan bakar minyak) di Kilang Balongan. (DHF)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
4	SUARA PEMB.	13	18-6-'02

UGM Temukan Alat Deteksi Pemalsuan Minyak

GRUP Riset Fisika Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) UGM berhasil menemukan teknologi generik tentang tomografi komputer, yang bisa dikembangkan sebagai alat untuk mendeteksi pemalsuan bahan bakar cair. Dengan peralatan itu, dapat diketahui apakah premium (bensin), minyak tanah, minyak goreng, dan oli betul-betul asli atau hasil oplosan.

Koordinator peneliti, Dr Gede Bayu Suparta, kepada *Pembaruan* baru-baru ini mengatakan, teknik tomografi komputer (*computed tomography*) sebelumnya sudah dikembangkan. Fakultas MIPA UGM untuk merancang bangun, dengan sederhana dan biaya relatif murah, alat *CT scanner* medis yang mampu memetakan otak atau bagian tubuh tanpa perlu memotong tubuh pasien.

Dalam perkembangannya, teknik tomografi komputer terbukti dapat menjadi alat deteksi pemalsuan bahan bakar cair karena sistemnya mampu memetakan besaran mikroskopis seperti koefisien atenuansi linear sebagai fungsi karakteristik energi radiasi nuklir perput sinar-X dan nomor atom bahan objek.

"Jadi, besaran fisik yang sangat karakteristik dan membedakannya dengan bobot, warna, kekentalan, dan bau. Hal ini cenderung mudah disintesis dengan kemajuan iptek saat ini," katanya. Menurut Gede Bayu Suparta, pihaknya siap mendampingi instalasi teknologi tomografi komputer bagi lembaga, instansi, kelompok masyarakat, atau individu yang memerlukan.

Dia optimistis, dengan kegunaan temuan itu, tindak pemalsuan BBM yang sangat merugikan negara maupun konsumen akan dapat ditekan sekaligus meningkatkan mutu kehidupan masyarakat agar mencapai standar kehidupan yang lebih sehat, aman, dan nyaman. (037)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BISNIS IND.	2	19-6-'02

FeNi III diduga pakai dana rencana darurat

JAKARTA (Bisnis): Pembangunan proyek FeNi III milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) diduga memakai dana dari rencana darurat yang kemungkinan bakal disetujui dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) perseroan hari ini.

Sumber *Bisnis*, mengatakan meskipun IKB Hermes telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Antam untuk membiayai proyek FeNi III senilai US\$350 juta-US\$360 juta, Antam tidak akan menggunakan fasilitas pinjaman itu kalau RULBPS tidak menyetujui.

"Indikasinya proyek FeNi III akan dibiayai oleh dana dari rencana darurat yang telah disiapkan Antam," ujar sumber itu kemarin.

Sebab, lanjutnya, jika menggunakan pinjaman dari IKB Hermes risikonya agak besar, di mana biaya proyek FeNi III yang akan ditanggung Antam semakin besar akibat menguatnya nilai Euro dan depresiasi nilai US\$.

Dalam memantapkan persiapan tersebut, lanjut dia, BUMN pertambangan itu telah mengadakan *beauty contest* untuk memilih penjamin emisi dalam penerbitan obligasi US\$ dan rupiah.

Ketika dimintakan konfirmasi, sekretaris perusahaan Antam Dohar Siregar mengatakan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut karena hal itu akan ditentukan dalam RULBPS.

Pada awalnya untuk mendukung rencana darurat tersebut, Antam menyediakan ekuitas sekitar US\$70 juta, pinjaman dari Bank Mandiri antara US\$70 juta-US\$75 juta, dan dana hasil emisi obligasi rupiah US\$60 juta.

Namun sebagai antisipasi kegagalan diperolehnya pinjaman dari Hermes, BUMN itu akhirnya meluaskan rencana darurat melalui penerbitan obligasi rupiah dan obligasi US\$ tidak hanya terbatas pada US\$60 juta tetapi nilainya minimum mencapai US\$150 juta.

Untuk mendapat kucuran kredit ekspor dari IKB Hermes, PriceWaterhouseCoopers mulai mengaudit proyek FeNi III milik Antam sekitar akhir triwulan III tahun 2001 untuk mengetahui apakah proyek itu layak diberi pinjaman.

Bahkan BUMN pertambangan itu juga telah menjamin proyek FeNi I, FeNi II, FeNi III, dan hasil ekspornya untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

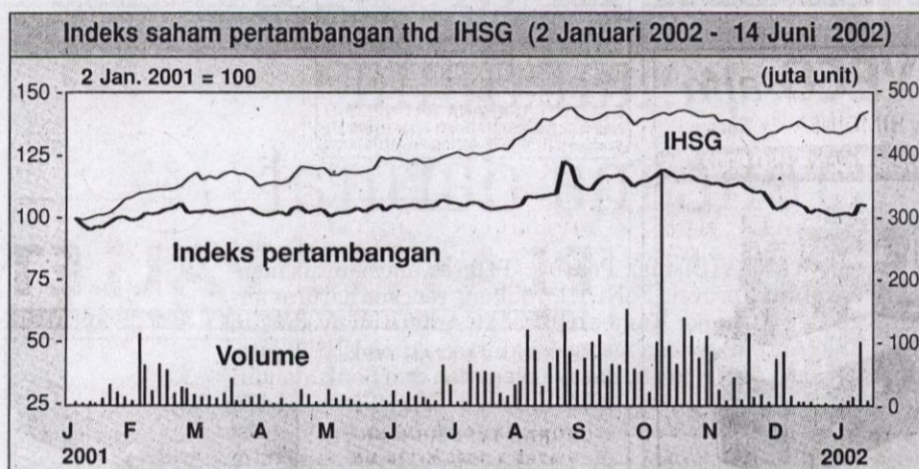
Namun persetujuan dari Hermes yang sebelumnya diharapkan pada akhir Maret 2002 hingga batas akhir Mei (28 Mei) belum juga diperoleh Antam. Namun IKB Hermes pada akhirnya menyetujui pemberian pinjaman tersebut.

Roes Aryawijaya, Deputi Meneg BUMN, mengatakan keputusan penggunaan pinjaman dari IKB Hermes ditentukan dalam RUPS Juni 2002. (11)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	BISNIS IND.	24	19-6-'02

INDEKS SAHAM PERTAMBANGAN & ENERGI



Kinerja saham sektor pertambangan 7 - 14 Juni 2002

No.	Nama perusahaan	Kurs saham (Rp.)		Gain /loss (%)	Likuiditas	Nilai pasar (Rp. Juta)	Saham yang tercatat (Unit)	Sudah dimiliki investor asing (Unit)	P/BV 2001 (x)	PER 2001 (x)
		7/6/02	14/6/02							
1	Alter Abadi	45	45	0,00	TL	17.922	998.260.000	163.575.500	-0,14	-0,07
2	Aneka Tambang	1.175	1.250	6,38	SL	1.538.461	1.230.769.000	208.171.503	0,84	2,92
3	Bumi Resources Tbk	35	40	14,29	SL	776.160	19.404.000.000	23.133.500	0,00	0,00
4	Central Korporindo Int'l Tbk	15	15	0,00	SL	34.500	2.300.000.000	43.486.500	0,23	21,97
5	Citatah Industri Marmer	155	135	-12,90	L	17.010	126.000.000	124.074.000	-0,05	0,04
6	INCO	5.900	5.850	-0,85	TL	1.453.190	248.408.468	50.335.630	0,17	3,91
7	Medco Energi Corporation	1.475	1.525	3,39	SL	5.081.988	3.332.451.450	2.622.157.810	1,25	5,57
8	Tambang Timah (Persero)	575	600	4,35	SL	301.981	503.302.000	171.640.423	0,19	-1,20

IHSG melejit, saham pertambangan spekulatif

JAKARTA: Pada transaksi periode pekan kemarin, IHSG terus memperlihatkan kenaikan yang spektakuler. Indeks saham gabungan BEJ ditutup ke posisi 545,129 (14 Juni) setelah melejit 30,98 poin atau 6,03% dari level awal 514,028 (7 Juni). Aktivitas perdagangan berlangsung marak disertai pembelian saham-saham unggulan dan lapis dua termasuk saham sektor pertambangan yang kian spekulatif.

Bahwa Indonesia masih tetap bekerjasama dengan IMF hingga 2003 turut memberi ketenangan bagi pasar. Ditandatangani Lol VI dan komitmen pemerintah melakukan penjualan aset di BPPN serta merta membangkitkan kembali kepercayaan pasar.

Seluruh saham pertambangan yang diperjualbelikan mencapai Rp85,863 miliar dengan volume 129,175 juta unit. Saham Medco Energi membuka nilai transaksi tertinggi Rp74,425 miliar sementara kursnya naik 3,39% menjadi Rp1.525.

Kenaikan kurs antara lain dipicu faktor *technical rebound* mengingat pergerakan saham di periode-periode sebelumnya sudah mengalami tekanan *profit taking*.

Dari delapan saham pertambangan yang di-

perdagangkan, empat diantaranya berhasil mencatatkan *gain*, dua saham terkoreksi dan sisanya stagnan karena tidak likuid. Saham Tambang Timah menjadi ajang spekulasi di tengah kinerja keuangan yang semakin memprihatinkan.

Selama tiga bulan pertama tahun ini Timah hanya memperoleh laba bersih Rp1 miliar atau merosot 99% dibanding laba periode yang sama 2001 Rp116,4 miliar.

Melemahnya kinerja emiten secara keseluruhan disebabkan turunnya harga logam timah serta apresiasi rupiah yang menyebabkan harga pokok penjualan membengkak. Total penjualannya turun 32,7% hanya menjadi Rp241,7 miliar sedangkan harga pokok penjualannya melejit 73,5% menjadi Rp208,9 miliar.

Bergairahnya perdagangan saham di Bursa Jakarta tidak terlepas dari sikap pelaku pasar yang mencermati bahwa kemungkinan asing akan masuk kembali ke Indonesia sebagai lahan investasi yang menarik. Dengan berbagai perkembangan positif investor masih akan mengakumulasi saham sektoral yang fundamental bagus dan memiliki prospek cerah.

• Sigma Research Inc.

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SUARA PEMB.	15	18-6-'02

DPRD Bengkulu Minta Kerja Sama dengan PLN Ditinjau

BENGKULU - Kalangan DPRD Kota Bengkulu mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meninjau ulang kerja sama dengan PT (Persero) PLN Bengkulu dalam hal penetapan pajak penerangan jalan karena berdasarkan kontrak kerja sama yang ditandatangani beberapa waktu lalu itu, Pemkot Bengkulu rugi Rp 40 juta/bulan.

"Kerja sama ini tidak bisa dipertahankan terus karena bila kontrak tetap dipertahankan Pemkot Bengkulu bisa bangkrut. Karena itu, agar sama-sama tidak dirugikan kontrak kerja yang sudah berjalan harus dikaji ulang," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bengkulu, R Nawawi Simil SH, kepada *Pembaruan*, di Bengkulu, Senin (17/6).

Nawawi mengatakan, pihak legislatif sudah berkali-kali mengingatkan Pemkot menyangkut kerja sama de-

ngan PLN Wilayah IV Cabang Bengkulu, karena tidak menguntungkan. Tapi, imbauan dewan tidak diubris. Hal ini terbukti kerja sama tersebut tetap berjalan.

Bahkan, dalam rapat mengenai RAPBD pada 8 Januari 2002 dewan sudah meminta Pemkot Bengkulu untuk mengubah kontrak pembayaran pajak penerangan lampu jalan dengan PLN sebanyak Rp 96 juta/bulan. Pembayaran pajak penerangan lampu jalan itu harus dibayar Pemkot ke PLN setiap awal bulan meskipun hanya sebagian lampu jalan yang diaktifkan.

Kenyataannya jumlah pemakaian listrik lampu jalan di Kota Bengkulu tidak sebesar yang tercantum dalam kontrak kerja sama itu. Atas dasar inilah DPRD meminta Wali Kota Bengkulu untuk meninjau ulang kontrak dengan PLN itu.

Soalnya, jika kontrak terus dilaksanakan sampai Desember mendatang maka Pemkot Bengkulu mengalami kerugian Rp 480 juta. "Uang sebanyak itu sangat besar artinya bagi Pemkot, karena PAD daerah ini sangat kecil. Selain itu, kerja sama dinilai memboroskan dana PAD," kata Nawawi.

Oleh karena itu Pemkot diminta membatalkan kerja sama dengan PLN atau paling tidak Pemkot membayar rekening listrik ke PLN berdasarkan jumlah Kwh terpakai, seperti yang diterapkan kepada pelanggan. Artinya, Pemkot membayar pajak penerangan lampu jalan ke PLN berdasarkan Kwh yang terpakai setiap bulan.

Dengan cara ini Pemkot Bengkulu tidak akan rugi sampai Rp 40 juta/bulan, seperti yang terjadi enam bulan terakhir ini. "Yang jelas

meski kerja sama tidak dibatalkan, tapi harus ada perubahan dari sebelumnya, sehingga Pemkot Bengkulu tidak selamanya dirugikan," tambahnya.

Dispenda

Sementara itu, Wali Kota Bengkulu Drs H Chairul Amri Zakaria SH MM ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara persis masalah kerja sama tersebut, karena soal pajak penerangan jalan langsung ditangani Dispenda.

Meskipun demikian pihaknya akan mempelajarinya. "Jika kerja sama tersebut merugikan Pemkot Bengkulu mengapa kita pertahankan. Yang jelas, saran dari dewan yang minta kerja sama pemkot dengan PLN ditinjau ulang akan kita pelajari," ujar Chairul Amri Zakaria. (143)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
4	REPUBLIKA	15	19-6-102

Atasi Krisis Air Tawar dengan Desalinasi

Meskipun prinsip kerjanya sederhana, hasil desalinasi luar biasa. Satu unit mampu mengeluarkan lima ribu liter air tawar, hanya dalam 24 jam.

JAKARTA — Tanyalah pada masyarakat Kepulauan Seribu, apa yang mereka minta andaikan ada teknologi yang bisa membantu kehidupan mereka? Jawabnya, teknologi yang bisa mengubah air asin menjadi air tawar.

Cerita bagaimana sulit masyarakat di wilayah seribu pulau ini mendapatkan air untuk minum, mandi, atau keperluan lain, sudah bukan cerita baru. Sejak bertahun-tahun mereka hidup dengan menghemat air yang mereka datangkan dari 'daratan Jawa'. Padahal, transportasi untuk mendatangkan air tersebut tidak murah. Belum lagi keterbatasan sarana angkutan.

Untuk alasan itu juga, kemarin, Bupati Kepulauan Seribu, Kamil Abdulkadir, datang ke BPPT. Ia akan menandatangani sebuah kesepakatan dengan lembaga pengkajian teknologi ini dalam hal penyediaan air tawar. BPPT ternyata memiliki sebuah 'ramuan' bagaimana membuat air laut menjadi air tawar. Ramuan itu diberi nama 'teknologi desalinasi'.

Prinsip kerja teknologi ini sebetulnya sederhana. Secara teori, air laut itu asalnya dari air tawar. Hanya saja, ada bahan-bahan tertentu yang tercampur di dalamnya sehingga membuat air tersebut asin. Nah, bila bahan-bahan ini dipisahkan, tentu air tersebut kembali menjadi tawar. Hanya saja, prinsip yang sederhana ini dikemas dalam peralatan canggih. Menurut Ketua Pelaksana

Program Desalinasi-BPPT, Bambang Gambiro, kepada *Republika* di sela-sela acara penandatanganan perjanjian ini, ada beberapa perangkat teknologi yang dipakai pada desalinasi. Salah satunya, perangkat yang bisa mentransfer energi dari matahari dan panas buang air radiator mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tidak termanfaatkan. Sementara untuk kekuatan mesin diesel tersebut akan digunakan mesin berkekuatan 2x500 kilowatt (kw) dan 2x250 kw.

Mengenai prosesnya, kata Bambang lagi, hampir serupa dengan proses terjadinya hujan secara alami. "Mulanya, air laut itu dipanaskan pada suhu 90-93 derajat Celcius. Selanjutnya, uap tersebut diembunkan pada kondisi vakum untuk mendapatkan air tawar. Barulah setelah itu dihasilkan air tawar yang berasal dari air laut," paparnya.

Meskipun prinsip kerjanya sederhana, namun hasilnya luar biasa. Satu unit desalinasi mampu menghasilkan air tawar dalam jumlah lima ribu liter, hanya dalam 24 jam.

Bila semua berjalan mulus, mudah-mudahan tahun ini juga alat-alat yang mendukung teknologi desalinasi akan dibangun. Diperkirakan, dalam waktu satu sampai dua tahun akan selesai. Hanya saja, kata Bambang, untuk tahap awal uji coba hanya akan dilakukan di Pulau Pramuka yang memiliki luas sekitar 15 hektar. Penetapan ini berdasarkan pengamatan sejak Juni 2001.

Pada tahun pertama, akan dilakukan uji alat. Sedangkan, tahun kedua akan dilakukan transfer teknologi kepada masyarakat setempat. "Jika ini berhasil, maka nantinya akan dilakukan juga di pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu yang berpenduduk," ujarnya.

Sementara itu Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Bambang Setiadi, menyatakan pilot proyek desalinasi menganggarkan dana Rp 260 juta. Dana tersebut berasal dari Daftar Isian Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIK-APBN).

Selain itu, BPPT dalam kerjasama pilot proyek ini menggandeng produsen desalinasi dari PT Sasakura, Jepang. Namun belakangan mereka yang menyatakan tertarik untuk ikut serta dalam proyek ini tak cuma Jepang, tetapi juga Korea dan Italia.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu, Kamil Abdulkadir menuturkan pihaknya sangat menanti pilot proyek desalinasi ini. Diakuinya, air bersih sampai sekarang masih menjadi masalah utama di Kepulauan Seribu. Selama ini air bersih yang dikonsumsi oleh 18 ribu jiwa penduduk Kepulauan Seribu berasal dari lima *Reverse Osmosis* (RO) yang terletak di lima pulau. "Sedangkan enam pulau berpenduduk lainnya masih belum memiliki RO," tandasnya.

Sedangkan untuk air bersih dari tanah dengan kedalaman 250-300 meter, kata Kamil lagi, saat ini ketersediaannya semakin terbatas. "Berdasarkan hasil penelitian, air dari sumber tanah, pada saat tertentu akan habis," ujarnya tanpa menyebutkan kapan akan habisnya ketersediaan air tanah tersebut. ■ c10